

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara kepulauan yang luas, sehingga pemerintah pusat memberikan sejumlah wewenang kepada pemerintah daerah, yang dikenal dengan istilah otonomi daerah. Dalam konteks otonomi daerah, desa dianggap sebagai elemen penting dalam pembangunan di Indonesia. Desa menjadi salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan suatu negara. Salah satu fokus utama pembangunan dalam program Nawacita yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo adalah membangun Indonesia dari daerah terpencil dengan memperkuat berbagai wilayah dan desa dalam kerangka negara kesatuan (Azhari, A., & Suhartini:2021). Dalam konteks otonomi daerah, desa dianggap sebagai elemen penting dalam pembangunan di Indonesia. Desa menjadi salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan suatu negara. Salah satu fokus utama pembangunan dalam program Nawacita yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo adalah membangun Indonesia dari daerah terpencil dengan memperkuat berbagai wilayah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Konsep Nawacita yang diusung sebagai program utama pembangunan oleh Presiden Joko Widodo juga menegaskan betapa pentingnya Dana Desa (Raharjo:2021).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 mengenai Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menyatakan bahwa "Dana Desa adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan untuk desa dan disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).""Untuk mendanai pelaksanaan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat". Tujuan penyaluran dana desa adalah sebagai wujud komitmen negara dalam melindungi dan mengembangkan desa, meningkatkan pelayanan publik di tingkat desa,

mengurangi kemiskinan, memajukan ekonomi desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai aktor utama dalam pembangunan. Dengan demikian, diharapkan dana desa ini dapat menjadi pendorong bagi desa untuk berkembang menjadi lebih maju, mandiri, dan demokratis, serta mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa. Dana Desa bertujuan untuk mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan desa yang mengarah pada masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Untuk mencapai tujuan ini, pengelolaan keuangan Dana Desa menjadi krusial dalam mengembangkan prioritas utama yang telah ditetapkan. Peran pemerintah desa sangat sentral dalam mengimplementasikan atau melaksanakan penggunaan dana ini agar sasaran yang diinginkan dapat tercapai dengan baik (Monteiro:2016).

Menurut Tribunnews.com, pada tahun 2019, dunia digemparkan oleh kemunculan sebuah virus mematikan yang menyebar dengan cepat, termasuk di Indonesia. Pada awal Maret 2020, virus bernama Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang berasal dari Wuhan, Tiongkok, mulai melanda Indonesia (Tribunnews, 2021). Penyebaran virus yang begitu pesat ini akhirnya berdampak ke seluruh wilayah Indonesia. Tidak hanya berdampak pada kematian massal, namun juga berdampak ke berbagai aspek kehidupan manusia seperti sosial dan ekonomi.

Menanggapi situasi tersebut, pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. Indonesia dinyatakan darurat Covid-19, dan sebagai respons, pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mempercepat penanganan virus. Penerapan PSBB ini membawa dampak luas pada perubahan aktivitas masyarakat, seperti keharusan menjaga jarak fisik, mengurangi kegiatan di luar rumah, serta menghindari tempat umum dan kerumunan. Dengan diterapkannya PSBB, beberapa aspek kehidupan masyarakat seperti kegiatan belajar mengajar di sekolah, aktivitas kerja (dialihkan menjadi bekerja dari rumah), dan kegiatan keagamaan di tempat ibadah menjadi terbatas. Pembatasan ini berdampak pada sektor ekonomi Indonesia, berpotensi meningkatkan jumlah masyarakat miskin. Untuk

mengatasi dampak ganda penyebaran Covid-19 dan peningkatan kemiskinan, pemerintah berinovasi dengan mengeluarkan kebijakan baru terkait pandemi. Salah satu program jaminan sosial yang diluncurkan adalah Bantuan Langsung Tunai (Azhari & Suhartini: 2021).

Bantuan Langsung Tunai adalah bantuan uang tunai yang diberikan langsung kepada keluarga miskin, masyarakat dengan anggota keluarga sakit kronis, dan mereka yang kehilangan mata pencarian akibat pandemi Covid-19. Dana ini bersumber dari Dana Desa, bertujuan sebagai program perlindungan sosial untuk meringankan beban masyarakat terdampak, mendorong konsumsi, dan mendukung pemulihan ekonomi desa.

Sebelum pandemi Covid-19, Dana Desa dialokasikan untuk berbagai sektor seperti pendidikan (misalnya PAUD, sarana prasarana, dan honorarium pengelola), kesehatan (seperti posyandu), dan infrastruktur (seperti pembangunan dan pemeliharaan jalan desa, drainase, serta perbaikan rumah tidak layak huni). Namun, akibat pandemi Covid-19, pada tahun 2020 Dana Desa tetap digunakan untuk pendidikan dan kesehatan, namun prioritas utamanya bergeser ke Bantuan Langsung Tunai (BLT). Pergeseran ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi.

Namun, pada saat ini masih banyak terjadi masalah dalam penyaluran Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dalam rangka pengimplementasian Dana Desa kepada masyarakat, dimana di berbagai wilayah masih banyak terjadi kesalahan seperti dalam pendataan kepada masyarakat yang menjadi penerima bantuan Dana Desa misalnya pendataan yang tidak sesuai dengan aturan, pendataan yang kurang transparan yang menyebabkan adanya keluhan dari masyarakat bahwa tidak terdata padahal berhak untuk menerima bantuan, adanya masyarakat yang menerima bantuan ganda atau double, dan adanya masyarakat terdata namun tidak berhak untuk menerima bantuan dan sebagainya. Seperti yang terjadi di Desa Cigadung Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes.

Adapun wilayah yang terdampak dari penyebaran Covid-19 salah satunya yaitu Kabupaten Brebes. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Kabupaten Brebes meningkat menjadi 17,03% pada tahun 2020. Angka ini naik 0,81% dari tahun sebelumnya, yang tercatat sebesar 16,22%. Peningkatan ini terjadi akibat dampak pandemi COVID-19, yang sangat memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat Brebes. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan untuk menekan penyebaran COVID-19 menyebabkan aktivitas ekonomi masyarakat terhambat. Akibatnya, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Brebes mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2024 Badan Pusat Statistik menyatakan bahwasanya persentase penduduk miskin di kabupaten brebes berkurang sebesar 15.60% atau sebesar 2,86 ribu jiwa masyarakat miskin kabupaten Brebes berkurang angka ini berkurang sebesar 0,18%. Yang mana salah satu penyebabnya yaitu karena penyaluran bantuan sosial masih dilaksanakan. (Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Brebes 2024 diakses pada 7 Januari 2025).

Desa Cigadung merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Banjarharjo. Desa ini terletak di sebelah barat Kabupaten Brebes dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Cirebon Timur. Desa Cigadung dibagi menjadi 3 dusun yaitu Dusun Beber, Dusun Cigadung, dan Dusun Kubanglingke. Meskipun terbagi menjadi 3 dusun, Desa Cigadung hanya memiliki satu kepengurusan pemerintahan, dan kepala desa yang sama. Desa Cigadung merupakan salah satu desa yang memiliki masyarakat dengan daya beli tergolong rendah, dan merupakan desa yang masih aktif dalam menjalankan program penyaluran bantuan langsung tunai di Kabupaten Brebes sehingga memungkinkan terjadi berbagai permasalahan dalam penyaluran bantuan langsung tunai di Desa Cigadung.

Berdasarkan pada data dari Sistem Informasi Kependudukan (SIAK) yang ditarik pada tanggal 3 Januari 2024 melalui wawancara bersama pak Darajat selaku pengawas aplikasi (SIAK) di Desa Cigadung. Desa Cigadung memiliki jumlah penduduk sebanyak 6.475 jiwa dengan jumlah

kepala keluarga sebanyak 2.226. Di Desa Cigadung, observasi awal yang dilakukan pemerintah desa untuk menyalurkan bantuan langsung tunai dengan melakukan survey lapangan lalu verifikasi data kepada calon keluarga penerima manfaat yang dilakukan oleh ketua RT di Desa Cigadung. Kemudian dari data tersebut dilanjutkan dengan pelaksanaan musyawarah desa khusus untuk menetapkan anggaran APBDES dan keluarga penerima manfaat.

Berdasarkan penjelasan di atas serta berdasarkan pengamatan sementara melalui wawancara dengan kepala desa dan sekretaris desa yang peneliti lakukan, di Desa Cigadung masih terdapat masyarakat yang tidak memahami mengenai mekanisme dari program bantuan langsung tunai, sehingga menyebabkan timbulnya kecemburuan sosial, dan pertanyaan dari masyarakat kepada pemerintah desa, kurangnya forum diskusi serta wadah yang menaungi pengaduan untuk masyarakat, terdapat pengurangan penerima bantuan langsung tunai dari 55 orang menjadi 43 orang dan mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Cigadung yaitu buruh harian lepas, namun dikarenakan dana desa yang terbatas sehingga yang diutamakan yaitu masyarakat yang sudah lanjut usia.

Dari adanya permasalahan di atas, maka diperlukan ketelitian dan ketepatan pemerintah dalam mengimplementasikan aturan-aturan dari pemerintah tentang syarat-syarat bagi penerima bantuan langsung tunai agar penyaluran dapat dilakukan secara tepat dan adil. Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, maka pengimplementasian penyaluran bantuan langsung tunai di Desa Cigadung menarik untuk diteliti, karena masih banyaknya masalah yang terjadi ataupun persepsi masyarakat terhadap penyalurannya.

Adapun maksud dan tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi komunikasi organisasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Cigadung dalam proses penyaluran bantuan langsung tunai, bahwasanya pada proses penyaluran bantuan yang efektif itu tidak hanya bergantung pada teknisnya saja, melainkan pada strategi komunikasi yang

tepat. Dan dengan melalui strategi komunikasi, pemerintah desa dapat memastikan bahwa informasi mengenai Bantuan Langsung Tunai dapat tersampaikan dengan jelas, akurat, dan tepat waktu kepada seluruh masyarakat desa yang menjadi sasaran, sehingga proses penyaluran dapat berjalan lancar dan transparan.

Penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Hidayatullah (2022), mengenai Strategi Komunikasi Pemerintah Desa Dalam Mensosialisasikan Bantuan Sosial di Masa Pandemi Covid-19 di Desa Bengkel Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat. Yang mana pada hasil dari penelitiannya menyebutkan bahwasanya strategi komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah sesuai dengan proses komunikasi dari teori komunikasi Laswell.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Strategi Komunikasi Pemerintah Desa Dalam Menyalurkan Bantuan Langsung Tunai di Desa Cigadung Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, identifikasi masalah permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Terdapat strategi komunikasi organisasi pemerintah desa yang kurang dipahami oleh masyarakat mengenai penyaluran program bantuan langsung tunai di Desa Cigadung.
2. Kurangnya forum diskusi serta wadah yang menaungi pengaduan untuk masyarakat guna menyampaikan aspirasi dan keluhan terkait bantuan langsung tunai di Desa Cigadung.
3. Terdapat informasi mengenai bantuan langsung tunai yang tidak sampai ke seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti lansia, ataupun masyarakat yang tidak memiliki akses internet di Desa Cigadung.
4. Keterbatasan sumber daya manusia di Desa Cigadung.

5. Terbatasnya anggaran pembelanjaan dana desa di Desa Cigadung.
6. Daya beli masyarakat Desa Cigadung yang masih tergolong rendah.

### **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan Latar belakang masalah diatas maka untuk memastikan fokus penelitian dan memperjelas ruang lingkup penelitian ini. Beberapa pembatasan masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini, di antaranya:

1. Penelitian ini difokuskan terhadap Strategi komunikasi organisasi yang dibangun oleh pemerintah Desa Cigadung dengan menggunakan pendekatan manajemen POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*).
2. Penelitian ini difokuskan terhadap hal-hal yang menjadi faktor pendukung serta faktor penghambat bagi pemerintah Desa Cigadung dalam proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai.
3. Penelitian ini berfokus terhadap program penyaluran bantuan langsung tunai periode tahun 2024-2025.
4. Penelitian ini fokus terhadap masyarakat Desa Cigadung yang terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai sebanyak lima orang.

### **D. Perumusan Masalah**

Sebagaimana yang telah peneliti paparkan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah yang akan diteliti yaitu :

1. Bagaimanakah proses perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam menyalurkan bantuan langdung tunai di Desa Cigadung?
2. Bagaimanakah proses pengorganisasian yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam menyalurkan bantuan langdung tunai di Desa Cigadung?
3. Bagaimanakah pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai yang dilakukan oleh pemerintah Desa Cigadung?

4. Bagaimanakah pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah desa terhadap program penyaluran bantuan langsung tunai di Desa Cigadung?
5. Bagaimanakah pemerintah desa mengatasi faktor-faktor penghambat komunikasi dalam menyalurkan Bantuan Langsung Tunai?
6. Bagaimanakah pemerintah desa memanfaatkan faktor-faktor pendukung komunikasi dalam menyalurkan Bantuan Langsung Tunai?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin peneliti capai yaitu :

1. Guna mengetahui strategi komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam menyalurkan Bantuan Langsung Tunai di Desa Cigadung.
2. Guna mengetahui tahapan perencanaan program penyaluran bantuan langsung tunai di Desa Cigadung.
3. Guna mengetahui penentuan tim pelaksana kegiatan penyaluran bantuan langsung tunai oleh pemerintah desa di Desa Cigadung.
4. Guna mengetahui bagaimana proses penyaluran bantuan langsung tunai di Desa Cigadung
5. Guna mengetahui media apa saja yang digunakan oleh pemerintah Desa Cigadung dalam melaksanakan program penyaluran BLT.
6. Guna mengetahui apa saja yang menjadi faktor pendukung dalam menyalurkan bantuan langsung tunai di Desa Cigadung.
7. Guna mengetahui hambatan komunikasi dalam menyalurkan bantuan langsung tunai di Desa Cigadung.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai konsep-konsep kunci seperti strategi komunikasi organisasi, dan bantuan langsung tunai, membuat peneliti memahami akan konteks faktor yang dapat mempengaruhi pemerintah desa pada proses penyaluran terhadap BLT, yang sangat penting untuk merancang strategi komunikasi organisasi yang efektif. Pada penelitian juga bisa

mengetahui dinamika internal komunitas desa, termasuk struktur sosial, norma, dan nilai-nilai yang mempengaruhi komunikasi dan penerimaan BLT. Serta memungkinkan peneliti untuk melakukan *review literatur* dan membandingkan temuan mereka dengan penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga dapat mengidentifikasi gap dalam literatur dan kontribusi baru yang dapat dibuat (Janah, A. R:2015).

## **2. Kegunaan Praktis**

### **a) Bagi Jurusan KPI**

Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa jurusan komunikasi dan penyiaran islam yang melakukan penelitian lain yang serupa di desa-desa lain. Dan hasil penelitian dapat memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya bagi jurusan komunikasi dan penyiaran islam.

### **b) Bagi Pemerintah Desa Cigadung**

Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang konkret untuk memperbaiki proses penyaluran BLT, sehingga bantuan dapat tersalurkan dengan tepat sasaran dan tepat waktu serta penelitian ini juga dapat mengidentifikasi ranah yang perlu diperbaiki dalam hal transparansi proses penyaluran BLT, sehingga masyarakat dapat lebih percaya terhadap pemerintah desa.

### **c) Bagi Peneliti**

Bagi peneliti, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi konkret untuk memperbaiki sistem komunikasi, sehingga penyaluran bantuan dapat lebih efisien, tepat sasaran, dan transparan. Selain itu penelitian ini juga dapat membantu mengukur seberapa efektif strategi komunikasi yang telah diterapkan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, mengurangi kesenjangan informasi, dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

### **d) Bagi Pembaca**

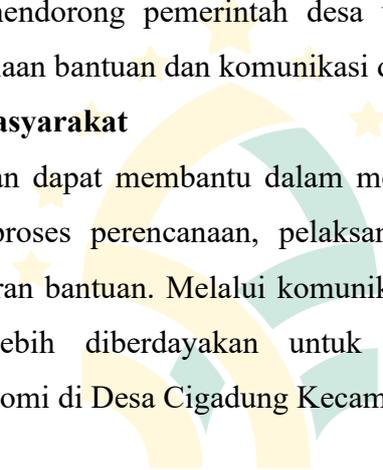
Desa Cigadung dapat menjadi studi kasus yang menarik untuk mengembangkan model komunikasi yang efektif dalam konteks penyaluran bantuan di desa-desa lain. Selain itu penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori komunikasi, terutama dalam konteks komunikasi organisasi.

**e) Bagi Pemerintah Desa**

Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk menyusun kebijakan publik yang lebih baik terkait dengan penyaluran bantuan dan komunikasi pemerintah dengan masyarakat. Penelitian ini juga dapat mendorong pemerintah desa untuk lebih loyalitas dalam pengelolaan bantuan dan komunikasi dengan masyarakat.

**f) Bagi Masyarakat**

Penelitian dapat membantu dalam memperkuat peran masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan juga pengawasan penyaluran bantuan. Melalui komunikasi yang efektif, masyarakat dapat lebih diberdayakan untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi di Desa Cigadung Kecamatan Banjarharjo.



**UINSSC**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON